

**SKRIPSI**

**EVALUASI FUNGSI PERS DALAM PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH TAHUN 2015  
DI KABUPATEN MAJENE**

**Disusun dan diusulkan oleh :**

**I R W A N**

**Nomor Stambuk : 105640165712**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

**2016**

**EVALUASI FUNGSI PERS DALAM PEMILIHAN UMUM  
KEPALA DAERAH TAHUN 2015  
DI KABUPATEN MAJENE**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Ilmu Pemerintahan**

**Di susun Dan Diajukan Oleh**

**Irwan**

**No Stambuk 105640165712**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR  
2017**

## PERSETUJUAN

Judul Skripsi Penelitian : Evaluasi Fungsi Pers Dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Majene  
Nama Mahasiswa : Irwan  
Nomor Stambuk : 105640165712  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyetujui.

Pembimbing I



**Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si**

Pembimbing II



**Dr. H. Samsir Rahim S.Sos, M.Si**

Mengetahui,

Dekan

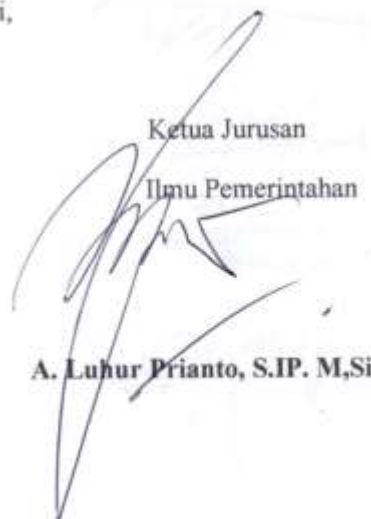
Fkip Unismuh Makassar



**Ir. H. Saleh Molla, MM**

Ketua Jurusan

Ilmu Pemerintahan



**A. Luhur Prianto, S.IP. M.Si**

## PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, berdasarkan Surat Keputusan/Undangan menguji ujian skripsi Dekan Fisipol Universitas Muhammadiyah Makassar, Nomor: 1184/FSP/A.1-VIII/VIII/38/2017 sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam program studi ilmu pemerintahan di Makassar pada hari Sabtu 26 Agustus 2017.

### TIM PENILAI

Ketua



**Ir. H. Saleh Molla, MM**

Sekretaris



**Dr. Burhanuddin, S.sos, M.si**

### Penguji:

1. Dr. H. Muhlis madani, M.Si



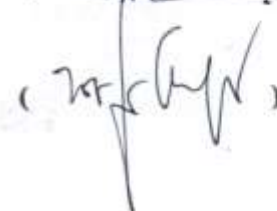
2. Dr. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M.Si



3. Dr. Jaelan Usman, M.Si



4. Dr. Anwar Parawangi, M.Si



## PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : I R W A N

Nomor Stambuk : 10564 01657 12

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa benar karya ilmiah ini adalah penelitian saya sendiri tanpa bantuan dari pihak lain atau telah ditulis / dipublikasikan orang lain atau melakukan plagiat. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku sekalipun itu pencabutan gelar akademik.

Makassar, 01 April 2016

Yang Menyatakan,



I R W A N

## ABSTRAK

**IRWAN** (2016). *Evaluasi Fungsi Pers Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Majene*, dibimbing oleh Hj. Muhajirah Hasanuddin, dan Samsir Rahim.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui fungsi pers sebagai media informasi, media pendidikan dan sebagai media komunikasi dalam pemilihan umum kepala daerah yang diselenggarakan secara serentak di Kabupaten Majene tahun 2015. Keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat dan juga sebagai media pendidikan kepada publik sekaligus menjadi penghubung atau alat komunikasi. Karenanya kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah Negara dan daerah khususnya Kabupaten Majene dalam menyampaikan dan menyebarkan informasi.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumen pribadi dan berbagai referensi lainnya dari berbagai sumber yang terpercaya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis oleh Penulis secara kualitatif dan kemudian dibahas dalam bentuk penjabaran dan memberi makna sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini analisis data yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan yang mengolah data yang dikumpulkan dari lapangan yakni wawancara, observasi dan dokumen serta beberapa referensi yang terkait untuk di analisis menjadi seperangkat informasi yang akurat dengan menggunakan metode kualitatif. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini adalah sebanyak 10 orang yang dipilih secara purposive (sengaja) yang dianggap memiliki pengetahuan tentang masalah yang diteliti.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa fungsi pers sebagai media informasi, media pendidikan dan media komunikasi dalam pelaksanaan pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Majene sangat berperan. Hal ini dibuktikan dengan pelaksanaan pemilukada yang berjalan dengan tertib, aman dan terkendali sesuai dengan yang diharapkan.

Kata kunci : Evaluasi, Fungsi Pers dalam Pemilukada

## KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis dengan ketenangan hati dan keteguhan pikiran sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Salam dan shalawat kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabat-sahabatnya. Akhirnya skripsi ini dapat selesai meskipun penulis menyadari bahwa didalamnya masih ada banyak kekurangan-kekurangan, karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki.

Walaupun dalam tahap penyelesaian laporan skripsi ini Penulis banyak menemui hambatan dan kesulitan mulai dari penelitian sampai pengolahan data, serta keterbatasan waktu, materi, dan lain sebagainya. Namun semua itu dapat Penulis atasi dengan bantuan dari Dosen Pembimbing serta rekan-rekan seperjuangan. Penulis sangat terbuka dengan kritikan yang membangun demi kesempurnaan penyusunan skripsi ini.

Tak lupa pula penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Idris M.Si selaku Dekan Fakultas Fisip Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak A.Luhur Prianto, S.IP.M,Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Ibu Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M,Si. selaku dosen pembimbing I dan Bpk Samsir Rahim, S.Sos,M,Si. selaku pembimbing II yang banyak

membantu mengarahkan penulis dengan baik sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

4. Bapak Dr. H. Muhlis Madani, M.Si selaku Ketua Doesn Penguji I, Dra. Hj. Muhajirah Hasanuddin, M,Si selaku Dosen Penguji II, Dr.Jaelan Usmani, M.Si selaku Dosen Penguji III dan Dr. Anwar Parawangi, M.Si selaku Dosen Penguji IV, yang telah memberikan saran dan kritik sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.
5. Seluruh dosen dan staf bagian Ilmu Pemerintahan serta segenap civitas akademika Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberikan ilmu, nasihat, melayani urusan administrasi dan bantuan lainnya.
6. Bapak Kepala Desa Kabupaten Majene beserta seluruh staf kantor desa dan masyarakatnya.
7. Rekan-rekan seprofesi yang banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

Akhir kata semoga semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri maupun bagi semua pihak yang berkenan untuk membacanya maupun mempelajarinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Amin.

Makassar, Maret 2017

Penyusun

**IRWAN**



## DAFTAR ISI

*Halaman*

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH</b> .....	iii
<b>ABSTRAK</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
A. Rumusan Masalah .....	9
B. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	10
 <b>BAB II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Konsep Evaluasi .....	11
B. Pengertian Fungsi .....	14
C. Pengertian Pers .....	15
D. Fungsi Pers .....	20
E. Pemilukada .....	22
F. Kerangka Pikir .....	26
G. Fokus Penelitian .....	28
H. Deskripsi Fokus Penelitian .....	28

**BAB III. METODE PENELITIAN**

A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	30
B. Jenis dan Tipe Penelitian .....	30
C. Sumber Data .....	31
D Informan Penelitian .....	31
E. Teknik Pengumpulan Data.....	32
F. Teknik Analisis Data .....	33
G. Pengabsahan Data .....	35

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Deskripsi Objek Penelitian .....	38
1. Profil Kabupaten Majene .....	38
2. Profil Pers .....	40
3. Visi dan Misi Kabupaten Majene .....	43
B. Evaluasi Fungsi Pers Dalam Pemilukada .....	43
1. Fungsi Pers sebagai Media Informasi .....	45
2. Fungsi Pers sebagai Media Pendidikan .....	49
3. Fungsi Pers sebagai Media komunikasi .....	54
C. Fungsi Pers dalam Pemilukada di Kabupaten Majene .....	58
D. Efektivitas Fungsi Pers .....	60

**BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	62
B. Saran .....	63

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>64</b>
-----------------------------	-----------

**JADWAL PELAKSANAAN PENELITIAN****LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pada era demokrasi dewasa ini, pers menjadi salah satu ekspresi kedaulatan rakyat serta unsur komunikasi dan pengawasan rakyat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terbentuknya masyarakat yang demokratis dalam suatu negara tidak bisa dipisahkan dari fungsi pers yang ada di negara tersebut. Pers mempunyai fungsi penting bagi perkembangan suatu negara menuju kehidupan berbangsa dan bernegara secara demokratis. Oleh sebab itu, kemerdekaan pers sangat dibutuhkan guna menciptakan kebebasan mengeluarkan pikiran dan pendapat sesuai dengan hati nurani. Begitu pula dengan kebebasan keadilan serta kebenaran dan usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan meningkatkan wawasan.

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) merupakan momentum yang sangat penting bagi pembentukan pemerintahan daerah pada periode berikutnya. Melalui Pemilukada rakyat memberikan persetujuan pemegang kekuasaan pemerintahan di daerah dan bagaimana menjalankannya. Pemilukada merupakan mekanisme bagi rakyat untuk memilih pemimpinnya. Pemilukada juga dapat dilihat sebagai proses evaluasi dan pembentukan kembali kontrak sosial yang dapat diartikan sebuah perjanjian antara rakyat / masyarakat dengan calon pemimpinnya atau antara manusia yang tergabung di dalam komunitas tertentu. Istilah kontrak

sosial digunakan didalam argumentasi yang menjelaskan hakikat dari kegiatan berpolitik atau menjelaskan tanggung jawab dari pemimpin kepada rakyat. Pemilu pada menyediakan ruang terjadinya proses diskusi antara pemilih dengan calon pemimpinnya, baik sendiri-sendiri maupun melalui partai politik, tentang bagaimana penyelenggaraan pemerintahan harus dilakukan.

Seperti diketahui, salah satu kebutuhan manusia yang juga penting adalah informasi, informasi ini diperlukan agar kita mengetahui perkembangan di sekeliling kita, tanpa informasi mungkin kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Informasi ini dapat kita dapatkan dari koran, radio, televisi, internet, majalah dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambar, tulisan, video, atau bentuk - bentuk lainnya. Berdasarkan jenis salurannya pers ini dapat dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, dan lain-lain. Sementara untuk media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Yang menjadi sasaran media massa adalah massa atau orang-orang. Massa ini bisa dibagi menjadi beberapa hal seperti lokal, nasional atau internasional. Untuk mendapatkan informasi diperlukan proses- proses yang lumayan panjang, dari mencari sampai nantinya mengumpulkan menjadi sebuah tulisan yang siap disebarluaskan. Proses tersebut disebut dengan jurnalistik. Kegiatan inti dalam media massa disebut dengan jurnalistik. Media massa sangat penting bagi masyarakat, karena dengan adanya media massa

masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan informasi. Entah itu informasi politik atau informasi - informasi penting lainnya.

Dalam masyarakat manapun baik itu yang terdapat di dalam negara maju ataupun yang terdapat di negara berkembang seperti Indonesia ini kehadiran dari media massa pasti tidak terlepas dari adanya lembaga sosial. Lembaga yang merupakan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik inilah yang kemudian dikenal sebagai pers. Pers ini bisa menyangkut segala media massa yang memenuhi kepentingan informasi masyarakat. Pers mempunyai dua posisi yang penting, yaitu yang pertama adalah sebagai kegiatan jurnalistik dan posisi yang kedua adalah sebagai lembaga sosial.

Keberadaan pers memiliki posisi strategis dalam informasi massa, pendidikan kepada publik sekaligus menjadi alat kontrol/pengawasan. Karenanya kebebasan pers menjadi salah satu tolok ukur kualitas demokrasi di sebuah Negara, seperti menyampaikan dan menyebarkan informasi. Pers memiliki peran penting dalam menyebarluaskan informasi (sosialisasi) mengenai proses dan ketentuan pilkada, kinerja peserta pemilukada serta hak dan kewajiban pemilih. Melalui peran tersebut pers ikut aktif melakukan pendidikan politik, yaitu membantu masyarakat menentukan pilihan politik mereka. Selain itu pers berperan penting dalam melakukan kontrol atas pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan tahun 2015 lalu khususnya di Kabupaten Majene dengan melaporkan kegiatan pelaksanaan pemilukada, sejak tahap pendaftaran pemilih hingga penghitungan suara.

Setelah pengundian nomor urut yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di beberapa daerah, dinamika sosial politik mulai meningkat. Dinamika tersebut terlihat dan terbaca dari peliputan pers, baik media cetak maupun media televisi. Bahkan sebelum proses pilkada berlangsung, seperti pengesahan data pemilih, pendaftaran calon dan dimulainya periode kampanye, berita pers sudah diramaikan dengan masalah politik uang, tarik-ulur partai pendukung calon, soal data pemilih hingga kampanye dini para calon. Oleh karena itu kehadiran pers dalam peranannya terhadap pelaksanaan pilkada adalah dalam rangka menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Disinilah pers berperan dalam menyampaikan informasi penting kepada masyarakat sehubungan jalannya proses pilkada tahun 2015 yang lalu tersebut. Pers dalam hal ini wartawan harus mampu memetakan titik kerawanan pada pentahapan pilkada. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah membangun jaringan kerjasama dengan Bawaslu/Panwaslu, Kepolisian dan seluruh masyarakat.

Selain hal tersebut di atas, akan menimbulkan kekhawatiran tentang timbulnya konflik dan kerusuhan secara serentak seperti pelaksanaan pilkada sebelumnya tidak sedikit daerah yang diwarnai konflik bahkan kerusuhan. Untuk mengantisipasi hal ini perlu adanya peranan jurnalis yang independen dalam memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan dan intervensi dari pihak lain, termasuk kelompok kepentingan politik tertentu. Wartawan harus mengedepankan

prinsip jurnalisme damai karena penyampaian informasi oleh pers bisa meredakan konflik dan juga bisa menimbulkan konflik. Olehnya itu, pemberitaan mengenai persoalan konflik pilkada perlu mengedepankan kedua hal tersebut. Kekurangan yang nampak dalam undang-undang pemilukada terkait proses penegakan hukum adalah tidak terdapatnya ketentuan pidana yang mengatur tentang politik uang (*money politic*) dan mahar politik. Karena politik uang dan mahar politik berdampak sampai terbentuknya pemerintahan. Apabila pers tidak berperan dengan baik selama proses pemilukada tahun lalu, maka sudah dipastikan proses pemilukada dapat memicu terjadinya hal tersebut.

Demikian, untuk mengawasi jalannya proses pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) dan wakil kepala daerah yang melakukan kecurangan atau hal lainnya, maka dalam kapasitasnya sebagai wartawan dengan perannya dalam mengawasi diharapkan dapat lebih aktif lagi dengan meningkatkan metode, mempelajari berbagai hal yang berkaitan dengan kecurangan pemilukada, termasuk aliran dana para kandidat selama proses jalannya demokrasi di daerah sehingga terwujudnya peran pers yang lebih optimal.

Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni tahun 2016 akan dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015. Sebanyak 273 (kalau catatan dari situs KPU maka ada 278 daerah, yang terdiri atas 269

Kab/Kota dan 9 Provinsi ) daerah otonom, 9 di antaranya merupakan provinsi, akan menyelenggarakan pilkada serentak pada Desember 2015. Pilkada serentak ini melaksanakan apa yang terdapat pada Pasal 201 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Pasal tersebut menyatakan, Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2015 dilaksanakan pada hari dan bulan yang sama pada tahun 2015.

Pemerintah dan KPU didukung kepolisian, partai politik, dan semua pemangku kepentingan menyatakan telah siap menyelenggarakan pilkada serentak pada 2015. Kesiapan tersebut salah satunya dengan diselesaikannya payung hukum pelaksanaan pilkada serentak. Pemerintah dan DPR telah mengesahkan UU Nomor 1 Tahun 2015, sebagaimana diubah melalui UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang. Pilkada serentak sendiri mengakomodir keinginan masyarakat yang menginginkan pelaksanaan pemilu (pemilihan umum) yang efisien dan hemat dari sisi pendanaan pelaksanaannya.

Mengingat demikian pentingnya pilkukada sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat di daerah secara langsung dan demokrasi, pentingnya pilkukada bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah yang demokratis juga dapat dilihat dari penegasan asas-asas pelaksanaan pemilu, yaitu langsung,



umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Namun, pemilukada tidak akan membawa perbaikan jika publik tidak mendapatkan informasi yang benar dan berimbang menyangkut sistem pemilihan serta kualitas calon kepala daerah. Informasi melalui pers terhadap pelaksanaan pemilukada dan kualitas calon adalah sarana bagi publik untuk melakukan fit and proper test guna menjatuhkan pilihan terhadap calon pemimpinnya. Hal ini bisa dilakukan jika pers melaporkan berita secara benar dan profesional. Tak dapat dipungkiri dalam keseharian, Pers terutama media cetak terkadang dalam memberikan informasi yang rancu atau simpang siur kepada masyarakat sehingga membingungkan masyarakat. Maka dari itu pers harus bisa menyampaikan informasi yang relevan dan dapat dipercaya.

Kebebasan pers memiliki hubungan yang erat dengan fungsi pers dalam masyarakat demokratis. Pers adalah salah satu kekuatan demokrasi terutama kekuatan untuk mengontrol dan mengendalikan jalannya pemerintahan. Dalam masyarakat demokratis pers berfungsi menyediakan informasi dan alternative pemecahan masalah yang dibutuhkan. Meskipun demikian, pers tidak bisa mempergunakan kebebasannya untuk bertindak seenaknya saja. Bagaimanapun juga, kebebasan manusia tidak bersifat mutlak. Kebebasan bersifat terbatas karena berhadapan dengan kebebasan yang dimiliki orang lain. Juga dalam kebebasan pers tidak bisa seenaknya memberitakan informasi tertentu, wajib menghormati hak pribadi orang lain.

Pers merupakan lembaga infrastruktur politik di negara Indonesia. Pers berada di masyarakat serta memiliki peran dan fungsi bagi masyarakat dan

negara. Pers memiliki kedudukan penting dalam masyarakat dan kehidupan bernegara. Dalam negara demokrasi, pers dianggap sebagai pilar demokrasi yang keempat setelah lembaga eksekutif, legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Karena pentingnya dalam kehidupan negara demokrasi, pers memiliki peranan yaitu sebagai saluran informasi kepada Masyarakat artinya pers berperan untuk mencari dan menyebarkan berita secara cepat dan luas kepada masyarakat. Pers menjadi sarana informasi antar kelompok masyarakat. Dalam hal ini, pers sebagai sarana komunikasi dari pers itu sendiri kepada masyarakat dan pertukaran informasi antar masyarakat. Pers juga berfungsi sebagai saluran bagi debat publik dan opini publik artinya pers berperan sebagai sarana komunikasi dari bawah ke atas atau dari masyarakat ke Negara. Masyarakat luas dapat menyampaikan beragam aspirasi, pendapat, kritik, usul, dan saran melalui pers. Pers menjadi sarana efektif dalam menampung berbagai aspirasi rakyat.

Fungsi pers dalam pemilu pada tahun 2015 di Kabupaten Majene yaitu sebagai Media / saluran informasi kepada masyarakat serta opini publik dan debat publik dimana pers sebagai penghubung antar masyarakat. Dengan adanya pers kita juga lebih tahu tentang jalannya proses atau perkembangan pemilu yang terjadi di seluruh Indonesia khususnya di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat.

Yang menjadi pokok permasalahan dalam hal ini pers harus memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui, menegakkan nilai-nilai demokrasi, mengembangkan informasi yang tepat, akurat dan lain-lain. Kita sebagai

masyarakat tentunya berharap fungsi dan peranan pers mampu mewujudkan Pemilukada yang berkualitas, terpenuhinya hak masyarakat untuk memilih dan dipilih, tegaknya supremasi hukum, tegaknya keadilan dan kebenaran, dan terpilihnya kepala daerah dan wakil kepala daerah yang sesuai dengan harapan masyarakat.

Adapun tujuan ini adalah untuk mengevaluasi fungsi pers dalam pemilihan umum kepala daerah (Pemilukada) tahun 2015 di Kabupaten Majene, Sulawesi Barat. Maka dari itu berdasarkan uraian tersebut Penulis tertarik untuk membahas tentang : “ **Evaluasi Fungsi Pers dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2015 di Kabupaten Majene** “.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan, maka yang menjadi rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana fungsi pers sebagai media informasi dalam Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Majene.
2. Bagaimana fungsi pers sebagai media pendidikan dalam Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Majene.
3. Bagaimana fungsi pers sebagai media komunikasi dalam Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Majene.

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang dilakukan yaitu :

1. Untuk mengetahui fungsi Pers sebagai media informasi dalam Pemilukada tahun 2015 di Kabupaten Majene.

2. Untuk mengetahui fungsi Pers sebagai media pendidikan dalam Pemilu pada tahun 2015 di Kabupaten Majene.
3. Untuk mengetahui fungsi Pers sebagai media komunikasi dalam Pemilu pada tahun 2015 di Kabupaten Majene.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi berbagai pihak, antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan pengetahuan lebih lanjut tentang peranan

pers khususnya dalam pemilihan kepala daerah sekaligus sebagai referensi dan bahan bacaan untuk penelitian-penelitian berikutnya dalam tema dan topik yang sama.

##### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini juga berguna untuk memecahkan permasalahan praktis. Semua lembaga yang bisa kita jumpai di masyarakat khususnya dalam bidang pemerintahan, sadar akan manfaat tersebut dengan menempatkan suatu penelitian dan juga pengembangan sebagai bagian dari integral organisasi.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Evaluasi**

Evaluasi yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *Evaluation*. Secara umum, pengertian evaluasi adalah suatu proses untuk menyediakan informasi tentang sejauh mana suatu kegiatan tertentu telah dicapai, bagaimana perbedaan pencapaian itu dengan suatu standar tertentu untuk mengetahui apakah ada selisih di antara keduanya, serta bagaimana manfaat yang telah dikerjakan itu bila dibandingkan dengan harapan-harapan yang ingin diperoleh. Dalam pengertian yang lain, evaluasi adalah suatu proses yang sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan, sampai sejauh mana tujuan program telah tercapai.

Evaluasi juga merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan serta hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini adalah kata serapan dari bahasa Inggris yaitu "*evaluation*" yang berarti penilaian atau penaksiran (Echols dan Shadily, 2000:220). Sedangkan menurut Yunanda (2009) pengertian istilah "*evaluasi merupakan kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan sesuatu obyek dengan menggunakan instrument dan hasilnya dibandingkan dengan tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan*".

Untuk memastikan bahwa pelaksanaan suatu program atau proyek mencapai sasaran dan tujuan yang direncanakan, maka perlu diadakan evaluasi dalam rangka peningkatan kinerja program atau proyek tersebut seperti yang diungkapkan oleh Hikmat (2004:3) bahwa evaluasi adalah proses penilaian pencapaian tujuan dan pengungkapan masalah kinerja proyek untuk memberikan umpan balik bagi peningkatan kualitas kinerja proyek.

Pengertian evaluasi lebih dipertegas lagi oleh Griffin & Nix (2000) menyatakan : “Pengukuran, penilaian dan evaluasi bersifat hierarki. Evaluasi didahului dengan penilaian (*assessment*), sedangkan penilaian didahului dengan pengukuran. Pengukuran diartikan sebagai kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan kriteria, penilaian (*assessment*) merupakan kegiatan menafsirkan dan mendeskripsikan hasil pengukuran, sedangkan evaluasi merupakan penetapan nilai atau implikasi perilaku”. Ada empat hal yang ditekankan pada rumusan tersebut, yaitu :

1. Menunjuk pada penggunaan metode penelitian,
2. Menekankan pada hasil suatu program,
3. Penggunaan kriteria untuk menilai,
4. Kontribusi terhadap pengambilan keputusan dan perbaikan program di masa mendatang.

Selain itu, menurut Crawford (2000: 30), tujuan dan atau fungsi evaluasi adalah :

1. Untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai dalam kegiatan.
2. Untuk memberikan objektivitas pengamatan terhadap perilaku hasil.
3. Untuk mengetahui kemampuan dan menentukan kelayakan.
4. Untuk memberikan umpan balik bagi kegiatan yang dilakukan.

Proses evaluasi memiliki tahapan-tahapan, walaupun tahapan setiap objek evaluasi berbeda-beda namun tidak menghilangkan fungsi dari evaluasi itu sendiri. Tahapan-Tahapan Evaluasi secara umum yaitu :

1. Menentukan topik evaluasi

Dalam mengevaluasi tentukan topik atau apa yang akan kita evaluasi baik itu suatu program kerja, atau hasil kerja.

2. Merancang kegiatan evaluasi

Sebelum melakukan evaluasi, sebaiknya merancang (desain) kegiatan-kegiatan evaluasi agar tidak ada yang kita lewatkan dalam evaluasi nantinya.

3. Pengumpulan data

Setelah merancang (desain) kegiatan, lakukanlah pengumpulan data sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam kegiatan evaluasi berdasarkan kaidah-kaidah ilmiah.

4. Pengolahan dan analisis data

Setelah data telah terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dengan mengelompokkan agar mudah dianalisis, dan sediakan tolak ukur waktunya sebagai hasil dari evaluasi.

## 5. Pelaporan hasil evaluasi

Hasil evaluasi harus diketahui oleh setiap orang-orang yang berkepentingan agar mengetahui hasil-hasil yang telah dia kerjakan.

Pada dasarnya tujuan akhir evaluasi adalah untuk memberikan bahan-bahan pertimbangan untuk menentukan/membuat kebijakan tertentu, yang diawali dengan suatu proses pengumpulan data yang sistematis.

## **B. Pengertian Fungsi**

Fungsi dapat diartikan sebagai kegunaan atau manfaat yang dimiliki sebagai tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online (2012), fungsi merupakan kegunaan suatu hal bagi hidup suatu masyarakat.

Fungsi adalah pemetaan setiap anggota dalam sebuah himpunan atau sekumpulan kepada anggota himpunan lain. Pengertian lain menyatakan bahwa fungsi adalah suatu relasi atau hubungan yang menghubungkan setiap anggota dalam suatu himpunan berupa kata, sekumpulan orang, benda atau obyek lainnya.

Fungsi memiliki sifat-sifat yang melekat padanya. Sifat-sifat tersebut adalah :

### 1. Fungsi injektif atau disebut juga dengan fungsi satu-satu.

Maksudnya apabila setiap dua elemen atau bagian yang berlainan di kelompok A akan dipetakan pada dua elemen yang berbeda di kelompok B.



2. Fungsi surjektif atau fungsi onto.

Suatu fungsi yang memetakan kelompok A ke kelompok B maka daerah hasil kelompok A dari fungsi tersebut adalah himpunan bagian dari kelompok B.

3. Fungsi bijektif atau fungsi korespondensi satu-satu.

Suatu pemetaan kelompok A ke kelompok B sedemikian rupa sehingga menjadikan fungsi yang injektif dan surjektif sekaligus.

Fungsi juga merupakan tindakan atau pola tingkah laku yang dilakukan oleh seseorang, sekelompok orang, organisasi ataupun suatu manajemen yang memiliki tugas dan peran yang melekat pada masing-masing karakteristik tersebut dalam rangka mengatasi suatu hal maupun permasalahan yang sedang terjadi.

Jadi fungsi merupakan bagian dari tugas utamanya yang harus dilakukan seseorang dalam menyelesaikan suatu kasus dalam suatu kelompok yang mempunyai sebab akibat dan sebagai aktifitas yang diharapkan dari suatu kegiatan yang menentukan suatu proses keberlangsungan.

### C. Pengertian Pers

Pengertian Pers terbagi beberapa bagian yang menurut para ahli di jabarkan sebagai berikut :

1. Pengertian pers dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI), 2012.

Di dalam KUBI pers mempunyai arti :

- (1) Alat untuk mencetak buku atau surat kabar.
- (2) Alat untuk menjepit, memadatkan.

(3) Surat kabar dan majalah yang isinnya berita,

(4) Orang yang bekerja di perusahaan yang berhubungan dengan surat kabar atau media cetak lainnya.

## 2. Pengertian pers dalam Ensiklopedia Pers Indonesia

Menurut EPI pers adalah sebutan bagi penerbit atau perusahaan ataupun kalangan yang berhubungan dengan media massa atau wartawan. Pers adalah segala barang yang dikerjakan dan dicetak menggunakan mesin cetak.

## 3. Pengertian pers menurut Undang-undang Nomor 40 Tahun 1999

Dalam UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, disebutkan bahwa definisi dari pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang dilaksanakan kegiatan jurnalistik. Contoh kegiatan jurnalistik antara lain meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

## 4. Pengertian pers menurut Harimurti Kridalaksana (2000) dalam Leksikon Komunikasi.

Dalam Leksikon Komunikasi terdapat beberapa poin tentang pengertian pers. Dan berikut ini adalah poin poin tentang pengertian pers :

a) Usaha percetakan dan penerbitan

b) Usaha pengumpulan dan penyiaran (menyebarkan) berita

c) Menyebarluaskan berita melalui surat kabar, majalah, radio dan juga televisi.

Dalam arti sempit pers ini mempunyai definisi yaitu surat kabar dan juga majalah, sementara dalam arti yang luas pers mempunyai arti sesuatu yang menyangkut atau berhubungan dengan media massa seperti (surat kabar, radio, televisi, film, internet, dll).

Salah satu kebutuhan manusia yang juga penting adalah informasi, informasi ini diperlukan agar kita mengetahui perkembangan di sekeliling kita, tanpa informasi mungkin kita akan menjadi orang-orang yang tertinggal. Informasi ini dapat kita dapatkan dari koran, radio, televisi, internet, majalah dan lain sebagainya. Informasi yang disampaikan dapat berupa gambar, tulisan, video, atau bentuk bentuk lainnya.

Berdasarkan jenis salurannya pers ini dapat dibagi menjadi dua yaitu media cetak dan media elektronik. Media cetak seperti surat kabar, majalah, buku, dll. Sementara untuk media elektronik seperti radio, televisi dan internet. Yang menjadi sasaran media massa adalah massa atau orang-orang. Massa ini bisa dibagi menjadi beberapa hal seperti lokal, nasional atau internasional. Untuk mendapatkan informasi diperlukan proses proses yang lumayan panjang, dari mencari sampai nantinya mengumpulkan menjadi sebuah tulisan yang siap disebarluaskan. Proses tersebut disebut dengan jurnalistik.

Kegiatan inti dalam media massa disebut dengan jurnalistik. Media massa sangat penting bagi masyarakat, karena dengan adanya media massa

masyarakat menjadi lebih mudah mendapatkan informasi yaitu informasi politik atau informasi-informasi penting lainnya. Dalam masyarakat manapun baik yang terdapat di dalam negara maju ataupun yang terdapat di negara berkembang seperti Indonesia ini kehadiran dari media massa pasti tidak terlepas dari adanya lembaga sosial. Lembaga yang merupakan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik inilah yang kemudian dikenal sebagai pers. Pers ini bisa menyangkut segala media massa yang memenuhi kepentingan informasi masyarakat.

Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, kata *Pers* (*Belanda*), atau *Press* (*inggris*), atau *Presse* (*prancis*), berasal dari bahasa latin, *perssare* dari kata *premere*, yang berarti “Tekan” atau “Cetak”, definisi terminologisnya adalah “media massa cetak” atau “media cetak”. Media massa, menurut Michael W. Gamble & Teri Kwal Gamble adalah bagian komunikasi antara manusia (*human communication*), dalam arti, media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia. Wartawan atau jurnalis adalah seorang yang melakukan kegiatan jurnalisme, yaitu orang yang secara teratur menuliskan berita (berupa laporan) dan tulisannya dimuat di media massa secara teratur untuk dipublikasi seperti koran, televisi, radio, majalah, film dokumentasi, dan internet. Wartawan mencari sumber mereka untuk ditulis dalam laporan dan menulis yang paling objektif dan tidak memiliki pandangan dari sudut tertentu untuk melayani masyarakat. Pada mulanya pekerjaan wartawan

dalam menulis berita dengan menggunakan mesin ketik atau mesin cetak yang masih sangat sederhana dengan cara menekan-nekan huruf keatas kertas. Proses menekan huruf dengan mesin cetak tersebut dinamakan press. Dengan semakin majunya perkembangan teknologi, pengertian pers terus meluas tidak hanya bagi wartawan media cetak. Tapi istilah pers juga digunakan untuk wartawan media elektronika sehingga istilah pers akhirnya menjadi satu kesatuan dengan aktivitas media massa. *Press Release* adalah informasi, berita, data yang dibuat oleh suatu lembaga atau institusi mengenai sesuatu hal, yang dikirimkan ke media massa. Tujuan membuat press release adalah agar informasi, berita, data yang dibuat dan dikirim ke media massa dapat dimuat.

#### **D. Fungsi Pers**

Kemerdekaan pers merupakan bentuk dari kedaulatan rakyat. Kemerdekaan pers harus mendasarkan diri pada prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supermasi hukum. Dengan menggunakan prinsip-prinsip itulah beberapa fungsi pers dirumuskan dalam UU nomor 40 tahun 1999 sebagai berikut :

##### 1) Fungsi Pers sebagai Media Informasi

Masyarakat menikmati pers sebab mereka membutuhkan informasi mengenai berbagai hal yang diperlukan dalam hidupnya, baik informasi politik, ekonomi (bisnis), hobi, life skill, atau bidang-bidang lainnya yang bermanfaat bagi kebutuhan hidupnya. Media menjadi sarana informasi dalam kelompok masyarakat. media meyebarkan berbagai

peristiwa, kejadian, dan tindakan dari warga atau kelompok masyarakat sehingga dapat diketahui masyarakat lain. Dalam hal ini, media sebagai sarana komunikasi dari media itu sendiri kepada masyarakat.

2) Fungsi Pers sebagai Media Pendidikan

Pers juga dapat berfungsi sebagai media pendidikan (*mass education*). Pers dapat memuat informasi-informasi yang berguna dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan hidup manusia. Dengan adanya pers, rakyat menjadi semakin cerdas karena bertambah wawasan pengetahuannya. Pers dapat memberikan pendidikan, wawasan pengetahuan, dan mencerdaskan masyarakat. Masyarakat yang secara teratur mencari dan mendapatkan berita dari pers akan semakin luas ilmunya, wawasannya dan pengetahuannya.

3) Fungsi Pers sebagai Media Kontrol Sosial

Pers harus bisa melaksanakan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan, baik korupsi, kolusi, nepotisme (KKN) maupun penyelewengan dan penyimpangan lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kehadiran kontrol sosial dari pers untuk memperbaiki keadilan melalui media massa. Kontrol sosial yang dilakukan oleh pers merupakan hal yang sangat penting.

4) Fungsi Pers sebagai Media Komunikasi

Pers menjadi sarana bagi antarpihak untuk melakukan hubungan, menjalin komunikasi, mendapatkan kebutuhan informasi, dan media untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan, tertulis maupun secara visual.

Media massa dapat menjadi media komunikasi dua arah, yaitu dari masyarakat ke negara dan dari negara ke masyarakat. Misalnya, negara membutuhkan informasi dari masyarakat mengenai program-program dan kebijakan negara, begitu pula masyarakat membutuhkan informasi-informasi yang telah, sedang, atau akan dilaksanakan pemerintah.

#### 5) Fungsi Pers sebagai Media Investigasi

Pers menjadi sarana untuk mengungkap masalah-masalah publik secara luas, seperti kebijakan pejabat, masalah pembangunan, program, dan usaha-usaha pemerintah kepada masyarakat. Informasi yang sebelumnya tertutup dan terbatas di kalangan pemerintahan dapat menjadi terbuka dan diketahui masyarakat. Pers dapat melakukan laporan dan penyidikan secara mendalam terhadap masalah publik yang sebelumnya tidak diketahui masyarakat menjadi diketahui masyarakat.

Sedangkan Fungsi pers di Indonesia, yaitu :

- a. Media/saluran formasi kepada masyarakat
- b. Media/saluran bagi opini publik dan debat publik
- c. Media/saluran Investigasi terhadap masalah-masalah publik
- d. Media/saluran pembelajaran
- e. Media/saluran kebijakan publik kepada masyarakat dan program pemerintah
- f. Memajukan kesejahteraan bangsa

Adapun faktor–faktor yang mempengaruhi fungsi pers, terbagi 2 yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, faktor pendukung tersebut adalah :

- a. Pers memainkan peran penting dalam masyarakat modern sebagai media informasi.
- b. Pers wajib memberitakan peristiwa dan opini dengan menghormati norma-norma agama dan rasa kesusilaan masyarakat.
- c. Pers sebagai penghubung dalam melakukan tindakan kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.

#### **E. Pemilukada**

Setiap Daerah di Indonesia Mempunyai Pemimpin diantaranya adalah Gubernur, Bupati dan wali kota. Untuk memilih pemimpin tersebut maka pemerintah pusat melaksanakan pemilihan langsung yang dilakukan oleh rakyat dalam satu daerah. Pemilihan ini biasa disebut sebagai Pemilukada. Pemilihan kepala daerah atau yang biasa disebut Pilkada atau Pemilukada dilakukan secara langsung oleh penduduk daerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan umum kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang antara lain Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, serta Wali kota dan wakil wali kota untuk kota.

Pemilukada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota. Sedangkan Khusus untuk daerah Aceh, Pemilukada diselenggarakan oleh



Komisi Independen Pemilihan (KIP) dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Aceh (Panwaslih Aceh).

Pengertian Lain tentang Pemilukada adalah Pemilihan Gubernur dan pemilihan Bupati/Walikota yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di provinsi dan Kabupaten/Kota untuk memilih Gubernur dan Bupati/Walikota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam penyelenggaraan Pemilukada telah diatur dalam Undang-Undang berikut adalah Dasar Hukum Penyelenggaraan Pemilukada yang antara lain adalah :

1. Undang-undang (UU) Nomor : 32 tentang Pemerintah Daerah
2. Undang-undang (UU) Nomor : 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah
3. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor : 17 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
4. PP Pengganti UU Nomor: 3 tentang PERPU NO. 3 TAHUN 2005.

Pemilihan kepala daerah (Pilkada atau Pemilukada) dilakukan secara langsung oleh pendudukdaerah administratif setempat yang memenuhi syarat. Pemilihan kepala daerah dilakukan satu paket bersama dengan wakil kepala daerah. Kepala daerah dan wakil kepala daerah yang dimaksud mencakup:

- a) Gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi
- b) Bupati dan wakil bupati untuk kabupaten

c) Wali kota dan wakil wali kota untuk kota

Sebelum tahun 2005, kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, kepala daerah dipilih secara langsung oleh rakyat melalui Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilukada pertama kali diselenggarakan pada bulan Juni 2005.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilukada dimasukkan dalam rezim pemilu, sehingga secara resmi bernama Pemilihan umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau disingkat Pemilukada. Pemilihan Umum Kepala Daerah pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah Pilkada DKI Jakarta 2007. Pada tahun 2011, terbit undang-undang baru mengenai penyelenggara pemilihan umum yaitu Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011. Di dalam undang-undang ini, istilah yang digunakan adalah Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.

Pada tahun 2014, DPR-RI kembali mengangkat isu krusial terkait pemilihan umum kepala daerah secara langsung. Sidang Paripurna DRI RI pada tanggal 24 September 2014 memutuskan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dikembalikan secara tidak langsung, atau kembali dipilih oleh DPRD. Putusan Pemilihan kepala daerah tidak langsung didukung oleh 226 anggota DPR-RI yang terdiri Fraksi Partai Golkar berjumlah 73 orang, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) berjumlah 55 orang, Fraksi Partai Amanat Nasional

(PAN) berjumlah 44 orang, dan Fraksi Partai Gerindra berjumlah 32 orang. Keputusan ini telah menyebabkan beberapa pihak kecewa. Keputusan ini dinilai sebagai langkah mundur di bidang "pembangunan" demokrasi, sehingga masih dicarikan cara untuk menggagalkan keputusan itu melalui uji materi ke MK. Bagi sebagian pihak yang lain, PemiluKada tidak langsung atau langsung dinilai sama saja. Tetapi satu hal prinsip yang harus digarisbawahi (walaupun dalam pelaksanaan PemiluKada tidak langsung nanti ternyata menyenangkan rakyat) adalah : Pertama, PemiluKada tidak langsung menyebabkan hak pilih rakyat hilang. Kedua, PemiluKada tidak langsung menyebabkan anggota DPRD mendapat dua hak sekaligus, yakni hak pilih dan hak legislasi. Padahal jika PemiluKada secara langsung, tidak menyebabkan hak pilih anggota DPRD (sebagai warga negara) hak pilihnya tetap ada.

PemiluKada diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pemiluKada adalah pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ketentuan ini diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa peserta pemiluKada juga dapat berasal dari pasangan calon perseorangan yang didukung oleh sejumlah orang. Undang-undang ini menindaklanjuti keputusan Mahkamah Konstitusi yang

membatalkan beberapa pasal menyangkut peserta Pilkada dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Pemerintah eksekutif dan legislatif telah menyepakati pilkada serentak untuk daerah-daerah yang akan habis masa jabatannya pada tahun 2015 dan semuanya diselenggarakan pada 9 Desember 2015. Untuk tingkat propinsi, ada 8 Propinsi yang akan menggelar pilkada serentak, sedangkan untuk tingkat kabupaten terdapat 16 kabupaten termasuk Sulawesi Barat.

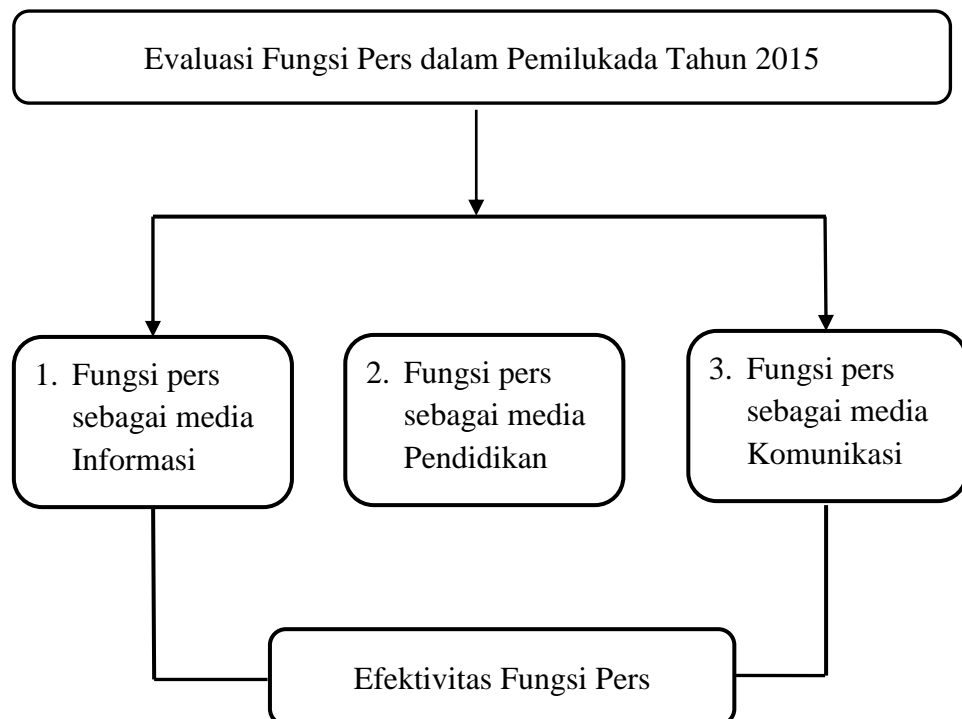
Kabupaten Majene adalah salah satu wilayah di Sulawesi Barat yang masuk dalam daftar pilkada serentak pada tahun 2015 yang lalu, tepatnya tanggal 25 Juni 2015.

#### **F. Kerangka Pikir**

Keberadaan pers dalam pilkada yang di laksanakan di Kabupaten Majene sangat berperan penting sebagai media informasi bagi masyarakat dalam memantau perkembangan yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pilkada tersebut. Hal ini sesuai dengan Fungsi pers dalam UU No. 40 tahun 1999, yaitu : (a). Fungsi Pers sebagai Media Informasi, yakni media menjadi sarana informasi dalam kelompok masyarakat. Media menyebarluaskan berbagai peristiwa, kejadian, dan tindakan dari warga atau kelompok masyarakat sehingga dapat diketahui masyarakat lain. Dalam hal ini, media sebagai sarana komunikasi dari media itu sendiri kepada masyarakat. (b). Fungsi Pers sebagai Media Pendidikan, Pers juga dapat berfungsi sebagai media pendidikan (*mass education*). Pers dapat memuat informasi-informasi yang berguna dalam pengembangan wawasan dan ilmu

pengetahuan hidup manusia. (c). Fungsi Pers sebagai Media Komunikasi, Pers menjadi sarana bagi antar pihak untuk melakukan hubungan, menjalin komunikasi, mendapatkan kebutuhan informasi, dan media untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan, tertulis maupun secara visual. Media massa dapat menjadi media komunikasi dua arah, yaitu dari masyarakat ke negara dan dari negara ke masyarakat. Agar lebih jelas, maka dapat dilihat pada bagan kerangka pikir sebagai berikut :

### **Bagan Kerangka Pikir**



**Gambar : Kerangka Pikir Penelitian**

### **G. Fokus Penelitian**

Fokus pada penelitian ini adalah fungsi pers dalam pemilukada tahun 2015, yaitu evaluasi fungsi pers dalam pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Majene. Dimana dalam hal ini fungsi pers sangat berpengaruh dalam Pemilukada. Pada penulisan ini, Penulis hanya menjelaskan pada 3 fungsi pers dalam pemilkuda yaitu sebagai media informasi, media pendidikan dan media komunikasi bagi masyarakat desa khususnya di daerah Kabupaten Majene dan Ibukota di seluruh Indonesia pada umumnya..

### **H. Deskripsi Fokus Penelitian**

Berdasarkan kerangka pikir di atas maka deskripsi fokus penelitian ini, yaitu :

1. Evaluasi Fungsi Pers merupakan suatu proses yang sistematis untuk menentukan sampai sejauh mana tujuan dari fungsi pers dapat tercapai dengan baik, khususnya dalam Pemilukada yang diselenggarakan di Kabupaten Majene.
2. Fungsi Pers sebagai media informasi yaitu memberikan informasi tentang pemilihan umum kepala daerah 2015 di Kabupaten Majene seperti pada siaran TV, Surat Kabar dan media lainnya sehingga :
  - a. Masyarakat dapat mengetahui secara langsung mengenai proses pemilukada.
  - b. Dapat mengetahui tentang profil calon kepala daerah.
3. Fungsi pers sebagai media pendidikan adalah :
  - a. Memperluas pengetahuan masyarakat tentang pemilukada.

- b. Mampu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilukada.
    - c. Sosialisasi tentang pemilukada.
4. Fungsi pers sebagai media komunikasi bahwa melalui pers masyarakat secara luas mengetahui perkembangan pemilukada di Kabupaten Majene sekaligus sebagai mediator dalam :
  - a. Menyampaikan informasi tentang pemilukada
  - b. Berkomunikasi dengan para kandidat/calon kepala daerah untuk menarik simpati masyarakat.
5. Efektivitas Fungsi Pers dalam pemilukada sebagai media informasi, media pendidikan dan juga sebagai media komunikasi khususnya di Kabupaten Majene ini sangat berperan penting dimana pers menjadi sarana bagi semua antar pihak dalam berinteraksi sosial. Pers menjadi penghubung satu sama lain baik secara lisan, tertulis, maupun secara visual. Dengan kata lain, fungsi pers sebagai media informasi, media pendidikan dan sebagai media komunikasi sudah menunjukkan efektivitas fungsi pers dalam pemilukada di Kabupaten Majene.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan selama 2 (dua) bulan yaitu pada tanggal 15 Oktober 2016 sampai tanggal 18 Desember 2016. Lokasi penelitian adalah di Kabupaten Majene disertai dasar pertimbangan penentuan lokasi bahwa fungsi pers masih belum efektif, terbukti masih terdapat pemberitahuan yang dapat membingungkan masyarakat dengan berbagai informasi yang kadang simpangsiur terkait dalam pemilukada tahun 2015 yang dilakukan secara serempak di Kabupaten Majene tersebut seperti informasi tentang jumlah hasil akhir pemungutan suara, dan sebagainya.

#### **B. Jenis dan Tipe Penelitian**

Dalam penulisan ini, Penulis menggunakan jenis dan tipe penelitian agar memperoleh data-data yang akurat yaitu:

##### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan pada penelitian ini adalah jenis kualitatif, artinya data yang dikumpulkan bukan berupa angka-angka melainkan data tersebut berasal dari hasil wawancara, catatan di lapangan, dokumen pribadi dan berbagai referensi lainnya dari berbagai sumber yang terpercaya. Sehingga yang menjadi tujuan ini adalah ingin menggambarkan realita empirik di balik fenomena secara terperinci,



mendalam dan tuntas tentang fungsi pers dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Majene.

## 2. Tipe Penelitian

Tipe penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian dengan melakukan survey di lokasi yang bersangkutan. Penelitian ini dilakukan untuk mengungkapkan fakta faktual tentang fungsi pers dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 di Kabupaten Majene.

### **C. Sumber data**

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung (interview) dengan beberapa pejabat struktural dan tokoh masyarakat di Kabupaten Majene tentang fungsi pers.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari kelembagaan atau instansi yang berhubungan dengan penelitian ini, serta literatur yang berasal dari buku, jurnal penelitian, skripsi dan internet.

### **D. Informan Penelitian**

Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu sengaja memilih informan karena mereka dianggap mengetahui pasti tentang obyek penelitian sehingga diharapkan dapat memberikan informasi yang akurat sesuai tujuan penelitian.

Adapun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel .1

No	Nama	Inisial	Jabatan/Strata	Keterangan
1	Kadir Tanniewa	KT	Pimpinan Redaksi Radar Sulbar	1 Orang
2	Jumiardi	JM	Pimpinan Redaksi Sulbar Express	1 Orang
3	Abdul Hafid	AH	Wartawan Senior Sulbar Express	1 Orang
4	Ediatma	ET	Wartawan Radar Sulbar	1 Orang
5	Asmanuddin, S.IP	AD	Ketua KPU Majene	1 Orang
6	Usman, S.AG	UM	Ketua Panwaslu	1 Orang
7	Rudiansyah	RS	Tokoh Pemuda Majene	1 Orang
8	Jabal	JB	Masyarakat	1 Orang
9	Budiman	BM	Masyarakat	1 Orang
10	Jabir	JR	Masyarakat	1 Orang
	<b>Jumlah</b>			<b>10 Orang</b>

#### E. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Observasi yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan secara langsung di lokasi penelitian tentang fungsi pers.
2. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara mengadakan dialog langsung dengan informan yang dinilai dapat memberikan informasi yang akurat dan tepat mengenai hal yang berkaitan dengan Pemilukada di Kabupaten Majene.
3. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data dengan membaca buku-buku referensi tentang pers khususnya peranan pers dalam Pilkada, sehingga memperoleh data teoritis yang lebih relevan.

## **F. Teknik Analisis Data**

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini selanjutnya dianalisis oleh Penulis secara kualitatif dan kemudian dibahas dalam bentuk penjabaran dan memberi makna sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Dalam penelitian ini analisis data yang di maksud adalah serangkaian kegiatan yang mengolah data yang dikumpulkan dari lapangan yakni wawancara, observasi dan dokumen serta beberapa referensi yang terkait untuk di analisis menjadi seperangkat informasi yang akurat dengan menggunakan metode kualitatif.

Analisis data atau prosedur analisis data dianggap oleh penulis mampu mengidentifikasi data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian ini, langkah-langkahnya seperti kode pembuka yang meliputi proses pengungkapan, memerinci, memeriksa, memilah-milah, membandingkan, mengkonseptualisasikan dan mengkategorikan data. Kode analisis, kategori-kategori yang relevan dengan fokus penelitian di analisis dan di organisir kembali.

Analisis data atau penafsiran data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan wawancara dan yang lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji dan menjadikannya sebagai temuan untuk mengklasifikasi, mereduksi dan menyajikannya (Muhadjir Tohirin, 2012).

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis data adalah sebagai berikut :

## 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses penyederhanaan data yang diperoleh di lapangan terkait dengan memilih dan memilah data yang relevan dan tidak relevan dengan fokus penelitian. Proses ini dilakukan selama dan sesudah pengumpulan data.

Tahap reduksi data antara lain :

- a. Meringkaskan data kontak dengan orang, kejadian dan situasi di lokasi penelitian.
- b. Pengkodean data  
Pengkodean data hendaknya memperhatikan setidaknya 4 hal yaitu :
  - 1) Digunakan symbol atau ringkasan
  - 2) Kode dibangun dalam suatu struktur tertentu
  - 3) Kode dibangun tingkat rinci tertentu
  - 4) Keseluruhannya dalam tingkat rinci tertentu.
- c. Dalam analisis selama pengumpulan data adalah pembuatan data yang obyektif.
- d. Membuat catatan reflektif.
- e. Menyimpan data.

## 2. Penyajian data

Penyajian data adalah upaya mengolah, menggabungkan dan menyusun informasi yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi dan dokumentasi yang disajikan dalam bentuk teks naratif yang menggambarkan dan menceritakan informasi yang mulanya terpecah dan

terpisah selanjutnya diklasifikasikan menurut tema dan kebutuhan analisis menjadi satu pembahasan yang utuh.

## **G. Pengabsahan Data**

Usaha-usaha yang dilakukan peneliti adalah mendatangi berbagai informan untuk melakukan wawancara tentang pers dalam kajian tentang peranan pers dalam pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) tahun 2015 di Kabupaten Majene Sulawesi Barat, untuk mendapatkan data yang relevan.

Peneliti memantau perkembangan yang ada di lapangan untuk melakukan secara langsung mengenai apa yang dilakukan oleh pelaku pers, sehingga data yang dikumpulkan oleh peneliti memiliki keabsahan data yang akurat. Untuk memperoleh data tersebut dalam penelitian ini, harus memenuhi empat kriteria utama yaitu :

### **1. Derajat kepercayaan**

Kredibilitas data yang di maksudkan untuk membuktikan data yang berhasil dikumpulkan sesuai dengan sebenarnya. Ada beberapa teknik untuk mencapai kredibilitas yakni teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi teman sejawat dan pengecekan kecakupan referensi.

### **2. Ketergantungan**

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian akan terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti

karena keterbatasan pengalaman, waktu, pengetahuan. Cara untuk menetapkan bahwa proses penelitian dapat di pertanggungjawabkan.

### 3. Kepastian

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang dilakukan dengan cara mengecek data dan informasi serta interpretasi hasil penelitian yang didukung oleh materi yang ada.

### 4. Keteralihan

Berupa teknik untuk mencapai kredibilitas, yakni teknik triangulasi, sumber, pengecekan anggota, perpanjangan kehadiran peneliti di lapangan, diskusi terjadinya kemungkinan kesalahan dalam mengumpulkan dan menginterpretasikan data sehingga data dapat di pertanggungjawabkan secara ilmiah. Kesalahan sering dilakukan oleh manusia itu sendiri terutama peneliti karena keterbatasan pengalaman.

Salah satu cara paling penting dan mudah dalam menguji keabsahan hasil penelitian adalah dengan melakukan triangulasi. Menurut Sugiyono (2012), teknik pengumpulan data triangulasi di artikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai macam teknik pengumpulan data serta sumber data yang ada. Menurut sugiyono, ada tiga macam bentuk triangulasi, yaitu :

#### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber berarti membandingkan dengan mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi melalui sumber yang berbeda.

## 2. Tringulasi Teknik

Tringulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik berbeda, misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu di cek dengan observasi, dokumen atau kuesioner.

## 3. Tringulasi Waktu

Waktu juga sering dipengaruhi kredibilitas data. Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat nara sumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan data yang lebih valid.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Deskripsi Objek Penelitian**

##### **1. Profil Kabupaten Majene**

Kabupaten Majene adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Sulawesi Barat, Indonesia. Ibu kota kabupaten ini terletak di Kota Majene. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 947,84 km<sup>2</sup>. Kabupaten Majene mempunyai posisi wilayah yang strategis, terletak sekitar 302 km sebelah utara Kota Makassar. Kabupaten ini dilengkapi dengan terminal induk dan terminal pembantu, sarana pelabuhan seperti pelabuhan Majene di kecamatan Banggae, Pelabuhan Palipi di kecamatan Sendana serta Pelabuhan Laut yang ada di kecamatan Pamboang dan kecamatan Malunda. Kabupaten Majene juga didukung dengan keberadaan sarana perdagangan berupa pasar permanen dan pasar darurat.

Kabupaten Majene terdiri terdiri dari 8 Kecamatan yaitu Banggae, Banggae Timur, Pamboang, Sendana, Tammoro'do Sendana, Tubo Sendana, Malunda dan Ulumanda, yang meliputi 40 desa dan kelurahan. Kecamatan Banggae dan Banggae Timur adalah dua kecamatan dengan luas wilayah terkecil dengan luas wilayah masing-masing 25,15 km<sup>2</sup> atau 2,65% untuk kecamatan banggae dan 3,17% dari luas total wilayah Kabupaten Majene untuk kecamatan Banggae Timur. Kecamatan Ulumanda merupakan wilayah kecamatan terluas disbanding dengan luas



wilayah kecamatan lainnya yakni; 456, 06 km<sup>2</sup> atau 48,10%, kemudian kecamatan Malunda dengan luas wilayah 187,85 Km<sup>2</sup> atau 19,81%.

Ibukota Kabupaten Majene terletak di Kecamatan Banggae dengan luas perkotaan 5.515 km, yang berada di posisi selatan Kabupaten Majene, dengan jam tempuh sekitar 3 jam sampai 4 jam dari ibukota Sulawesi Barat (Mamuju) yaitu  $\pm$  142 km. Secara geografis Kabupaten Majene terletak pada posisi 2' 38' 45" sampai dengan 3' 38' 15" Lintang Selatan dan 118'45' 00" sampai 119'4'45" Bujur Timur, dengan berbatasan di sebelah utara Kabupaten Mamuju, sebelah timur Kabupaten Polewali Mandar, sebelah selatan Teluk Mandar, dan Sebelah Barat adalah Selat Makassar. Klasifikasi kemiringan tanah secara keseluruhan relatif miring dengan persentase wilayah yang mengalami erosi sebesar 3,41 % dan luas wilayah kabupaten, dengan suhu udara antara 21 C sampai 34 C, serta jumlah hari hujan 208 hari. Kabupaten Majene berada pada ketinggian yang bervariasi antara 0 – 1.600 meter di atas permukaan laut, Daerah ini mempunyai topografi yang sebagian besar merupakan lahan perbukitan dengan vegetasi yang mulai rusak akibat adanya pembukaan hutan menjadi sawah ladang (30% dari luas total 94,784 ha). Kabupaten Majene berbatasan dengan :

- Sebelah Utara : Kabupaten Mamuju
- Sebelah Timur : Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa
- Sebelah Selatan : Teluk Mandar
- Sebelah Barat : Selat Makassar.

Untuk dapat ke Kabupaten Majene diperlukan waktu yang cukup lama, sebab kabupaten majene tidak memiliki Bandar udara sehingga perjalanan untuk ke Majene harus melalui Mamuju yang memerlukan waktu tiga jam dengan menggunakan bus terlebih dahulu kemudian dapat melanjutkan dengan pesawat. Namun bila dari Makassar memakai langsung ke Majene dengan menggunakan bus atau mobil sekitar enam sampai tujuh jam mengingat jarak Makassar – Majene sejauh 302 Km. Selain itu untuk ke Majene dapat di akses melalui jalur laut, dari Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan melalui pelabuhan Palipi di Kecamatan Sendana dan melalui Pelabuhan Majene di Kecamatan Banggai.

## 2 Profil Pers

Pers lahir ditengah situasi pemekaran Sulawesi Barat dari Propinsi induk Sulawesi Selatan yang terus berkembang. Jumlah wartawan pun terus bertambah seiring makin banyaknya perusahaan media yang melebarkan sayapnya hingga ke Sulawesi Barat. Menyadari hal tersebut para pekerja jurnalis di Sulawesi Barat memandang pentingnya sebuah induk organisasi yang bisa menaungi kerja mereka. Maka dibentuklah suatu wadah yang bernama Aliansi Jurnalis Independen Indonesia yang di singkat AJI Indonesia. AJI Indonesia sebagai salah satu organisasi kewartawanan selain PWI yang dinilai sebagai lembaga wartawan yang konsen memperjuangkan demokrasi, kebebasan pers dan hak-hak pekerja jurnalis menjadi pilihan.

Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa para pekerja jurnalis dalam menjalankan tugas-tugas jurnalisnya, menjadi alasan lain perlunya lembaga AJI dibentuk di Sulawesi Barat untuk menjalin kemitraan dengan organisasi wartawan lain yang lebih dulu terbentuk. Rencana pembentukan pengurus AJI kota Polman beberapa kali batal dideklarasikan, lantaran jumlah personil calon anggota belum memenuhi persyaratan untuk membentuk AJI kota yang berdiri sendiri. Impian para jurnalis/pers yang konsen membela demokrasi dan kebebasan pers di Sulawesi Barat sebetulnya telah dirintis oleh kawan-kawan jurnalis di Sulawesi Barat sejak tahun 2006 lalu.

Jumlah pengurus AJI Indonesia di masing-masing Kabupaten di Sulawesi Barat memang belum memenuhi ketentuan untuk mendirikan AJI Kota. Namun setelah melalui konsultasi panjang dengan pengurus AJI Indonesia di Jakarta, AJI Polman akhirnya mendapat persetujuan AJI Indonesia untuk berdiri sebagai AJI Kota yang sejajar dengan AJI Kota lain di Indonesia dengan beranggotakan dari tiga Kabupaten berbeda yaitu Mamuju, Majene dan Polewali Mandar. AJI Persiapan Kota Polman resmi dideklarasikan pada tanggal 09 Januari 2010 oleh Pengurus AJI Indonesia di Hotel Liberty Polewali Mandar, Sulawesi Barat. Sebanyak 26 wartawan dari berbagai media cetak, radio dan televisi di Kabupaten Mamuju, Majene dan Polewali Mandar Sulawesi Barat turut mendeklarasikan berdirinya AJI Kota Polman.

Perdebatan soal lokasi Sekertariat juga sempat menjadi diskusi panjang, namun peserta deklarasi bersepakat menempatkan kantor sekertariat di kota Polewali Mandar, mengingat jumlah anggota pengurus sebanyak 12 orang berada di kota Polewali Mandar. Sejak resmi dideklarasikan, AJI kota Polman terbilang cukup responsip terhadap perkembangan berbagai isu-isu demokrasi dan kebebasan pers di Indonesia.

Sejak jaman dahulu pers sudah digunakan pemegang kekuasaan untuk menyebarkan informasi kepada masyarakat. Pers sangat diperlukan sebagai media penyebar informasi akurat kepada massa. Kekuatan pers sebagai media massa dalam menyebarkan informasi sangatlah bagus dan akurat sehingga banyak orang yang tertarik untuk memiliki media sendiri yang digunakan untuk kepentingan pribadi.

Dalam pemilukada, fungsi pers ditunjukkan dengan mengawal dan memberitakan pemilukada seperti dari segi regulasi, kelembagaan penyelenggara, pengawas dan pemantau pemilukada juga lembaga survey hingga pemilih. Bagi penyelenggara pemilukada, pers melalui media massa sangat membantu karena ada yang memberitakan kegiatan tahapan pemilukada sehingga diketahui masyarakat luas khususnya dalam pemilukada serentak yang salah satunya dilaksanakan di Kabupaten Majene.

### **3. Visi dan Misi Kabupaten Majene**

#### **3.1. Visi Kabupaten Majene**

Adapun visi Kabupaten Majene yaitu :

- 1) Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, professional dan berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER (Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia) dan adil.
- 2) Meningkatkan kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam secara berkelanjutan.

#### **3.2 Misi Kabupaten Majene**

- 1) Membangun Sumber Daya Manusia yang kompeten sebagai upaya menciptakan penyelenggara pemilu yang professional;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu khususnya untuk para pemangku kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
- 3) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan pendidikan pemilih yang berkelanjutan;
- 4) Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien serta transparan.

### **B. Evaluasi Fungsi Pers Dalam Pemilukada**

Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi

negara dan pemerintahan yang demokratis. Menurut Miriam Budiardjo, bahwa salah satu ciri negara demokrasi adalah memiliki pers yang bebas dan bertanggung jawab. Keberadaan pers adalah salah satu jawaban dari pencarian solusi akan permasalahan penyebaran akses dan sarana komunikasi yang menjadi perkerjaan media massa umum. Pada perkembangannya telah banyak membuktikan fungsi pentingnya di tengah persoalan pelik akan akses informasi dan komunikasi juga dalam fungsinya sebagai kontrol sosial dan menjalankan ketiga fungsi pers lainnya yaitu sebagai media informasi. Pendidikan dan komunikasi.

Pers pada dasarnya memiliki dua pengertian, yaitu *pertama* pengertian pers dalam arti sempit yang hanya menunjuk kepada media cetak berkala seperti surat kabar, tabloid, dan majalah. *Kedua*, pengertian pers dalam arti luas yang tidak hanya menunjuk pada media cetak tetapi juga media elektronik dan media *on line*. (Sumadiria, 2005; 31). Berdasarkan pengertian tersebut, maka jelas bahwa pers merupakan media komunikasi massa. Sejarah perkembangan pers menunjukkan bahwa kehidupan pers sangat ditentukan oleh sistem politik dan ekonomi suatu negara dimana pers tersebut melakukan fungsinya. Bahkan dalam negara demokrasi, pers diposisikan sebagai salah satu unsur penting dalam mendukung terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Posisi pers tersebut tidaklah berlebihan sepanjang pers benar-benar secara profesional menjadi media komunikasi dan informasi bagi masyarakat, yakni menjadi media bagi masyarakat untuk memperoleh pengetahuan (informasi yang

benar dan dibutuhkan) serta untuk berekspresi (mengomunikasikan eksistensinya).

Pers adalah badan yang membuat penerbitan media massa secara berkala. Secara etimologis, media massa adalah bagian komunikasi antara manusia (human communication) dalam arti media merupakan saluran atau sarana untuk memperluas dan memperjauh jangkauan proses penyampaian pesan antar manusia. Pers secara umum diartikan sebagai media massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dalam bentuk tulisan, suara, dan gambar serta data dan grafik dengan menggunakan media elektronik dan media cetak.

Adapun hasil evaluasi terkait fungsi pers dalam pemelukada ini ada 3, yaitu sebagai media informasi, pendidikan dan media komunikasi yang penjabarannya sebagai berikut :

### **1. Fungsi pers sebagai media informasi**

Pers adalah salah satu sarana bagi warga negara untuk mengeluarkan pikiran dan pendapat serta memiliki peranan penting dalam negara demokrasi. Pers yang bebas dan bertanggung jawab memegang peranan penting dalam masyarakat demokratis dan merupakan salah satu unsur bagi negara dan pemerintahan yang demokratis. Pers merupakan pilar demokrasi keempat setelah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Pers sebagai kontrol atas ketiga pilar itu dan melandasi kinerjanya dengan *check and balance* untuk dapat melakukan peranannya perlu dijunjung kebebasan pers dalam menyampaikan informasi publik secara jujur dan berimbang. disamping itu pula untuk menegakkan pilar keempat ini, pers juga harus

bebas dari kapitalisme dan politik. pers yang tidak sekedar mendukung kepentingan pemilik modal dan melanggengkan kekuasaan politik tanpa mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang lebih besar. kemungkinan kebebasan lembaga pers yang terkapitasi oleh kepentingan kapitalisme dan politik tersebut, mendorong semangat lahirnya *citizen journalism*. Istilah *citizen journalism* untuk menjelaskan kegiatan pemrosesan dan penyajian berita oleh warga masyarakat bukan jurnalis profesional. Aktivitas jurnalisme yang dilakukan oleh warga sebagai wujud aspirasi dan penyampaian pendapat rakyat inilah yang menjadi latar belakang bahwa citizen journalism sebagai bagian dari pers merupakan sarana untuk mencapai suatu demokrasi. Wajah demokrasi sendiri terlihat pada dua sisi. Pertama, demokrasi sebagai realitas kehidupan sehari-hari, kedua, demokrasi sebagaimana ia dicitrakan oleh media informasi.

Fungsi pers sebagai media informasi dalam pemilukada di Kabupaten Majene sangat berperan dalam memantau perkembangan jalannya proses pemilukada tersebut. Melalui pers masyarakat di Kabupaten Majene dapat mengetahui berbagai informasi aktual dan terkini yang dapat disaksikan secara langsung maupun tidak langsung melalui siaran Televisi, Radio, Surat kabar maupun alat elektronik lainnya seperti komputer dan handphone.

Melalui pers sebagai media informasi maka :

- a. Masyarakat dapat mengetahui secara langsung mengenai proses pemilukada.



Hal ini dapat terlihat pada hasil wawancara dengan Jumiardi selaku Pimpinan Redaksi Sulbar Express yang mengatakan bahwa :

“Setelah melihat pelaksanaan Pemilihan Bupati (Pilbup), kita bisa melihat antusias pers itu sangat luar biasa. Pers sebagai media yang menyampaikan informasi kepada publik atau masyarakat sehingga pemilihan bupati dan wakil bupati bisa bersosialisasi langsung dan baik kepada masyarakat”.  
(Wawancara JM, 20 Nopember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa antusias pers sangat luar biasa dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang pelaksanaan pemilihan umum sehingga dalam pemilihan tersebut terjadi sosialisasi langsung antara calon bupati dan calon wakil bupati dengan masyarakat. Hal ini juga diungkapkan oleh Jabir selaku masyarakat, yang mengatakan bahwa :

“Masyarakat sangat antusias dalam melihat perkembangan pelaksanaan pilkada yang dilaksanakan di Majene, karena dengan keterlibatan pers untuk memberitakan dengan baik di tv maupun Koran/surat kabar yang menjadi pemahaman konsep yang baru sehingga masyarakat lebih pandai dalam menentukan pilihannya untuk kemajuan daerah”.  
(Wawancara JR, 04 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa masyarakat juga sangat antusias dalam melihat perkembangan pemilukada di Kabupaten dimana keterlibatan pers sebagai media informasi dalam memberitakan pelaksanaan pemilukada di berbagai media tv ataupun surat kabar/koran sangat diperlukan agar masyarakat lebih pandai dalam menentukan pilihannya masing-masing.

b. Dapat mengetahui tentang profil calon kepala daerah.

Media informasi merupakan bagian dari fungsi pers dari dimensi idealisme. Informasi yang disajikan pers merupakan berita-berita yang telah diseleksi dari berbagai berita yang masuk ke meja redaksi, dari berbagai sumber yang dikumpulkan oleh para reporter di lapangan. Pers mengemban fungsi positif dalam mendukung kemajuan masyarakat, mempunyai tanggung jawab menyebarluaskan informasi tentang kemajuan dan keberhasilan pembangunan kepada masyarakat pembacanya.

Pers sebagai lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pengumpulan dan penyebaran informasi mempunyai misi ikut mencerdaskan masyarakat, menegakkan keadilan mencerdaskan masyarakat, memberantas kebatilan. Selama melaksanakan tugasnya, pers terkait erat dengan tata nilai sosial yang berlaku dalam masyarakat. Dalam kehidupan sosial, masyarakat mempunyai hak untuk mengetahui segala hal yang berkaitan dengan hajat hidup mereka. Untuk itulah, pers sebagai lembaga kemasyarakatan dituntut untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi masyarakatnya dan melalui pers masyarakat dapat mengetahui tentang profil calon kepala daerah yang akan dipilihnya. Seperti pada wawancara dengan masyarakat bernama Budiman selaku informan di Majene, mengatakan bahwa :

“Pers itu dalam meliput berita pilkada kabupaten Majene harus dapat menampilkan profil calon kepala daerah agar masyarakat dapat memilih sesuai dengan hati nuraninya”.  
(Wawancara BM, 28 Nopember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas maka dapat dipahami bahwa pers dalam meliput berita juga harus dapat menampilkan beberapa profil calon kepala daerah agar di ekspos di media supaya masyarakat dapat melihat dan memilih calon kepala daerah sesuai dengan hati nuraninya. Padahal dalam kenyataannya pers meliput semua calon bupati di Kabupaten Majene selama calon-calon tersebut tidak merasa keberatan. Biasanya calon yang sering di ekspos di media adalah calon bupati yang lebih loyal dan terbuka terhadap masyarakat atau bisa juga calon tersebut lebih menonjol daripada calon-calon bupati lainnya yang bakal terpilih.

Sejauh ini fungsi pers masih sangat berpengaruh terhadap berbagai perkembangan politik yang ada di Indonesia khususnya di Kabupaten Majene. Pelaksanaan fungsi pers di Kabupaten majene sebagai media informasi amat sangat berpengaruh dalam pemilukada tersebut dan berjalan lancar sesuai yang diharapkan.

## **2. Fungsi Pers sebagai media pendidikan**

Pers sebagai media pendidikan dalam pemilukada ini yaitu pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat tentang jalannya proses pemilukada. Meningkatkan minat baca harus dibarengi dengan memberikan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat.

Adapun fungsi pers sebagai media pendidikan adalah :

a. Memperluas pengetahuan masyarakat tentang pilkada.

Dalam Pembinaan Idiil Pers disebutkan bahwa pers harus dapat membantu pembinaan swadaya, merangsang prakarsa sehingga pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Majene, peningkatan kehidupan spiritual dan kehidupan material benar-benar dapat terwujud. Untuk memberikan informasi yang mendidik itu, pers harus menyeimbangkan arus informasi, menyampaikan fakta di lapangan secara objektif dan selektif. Objektif artinya fakta disampaikan apa adanya tanpa dirubah sedikit pun oleh wartawan dan selektif maksudnya hanya berita yang layak dan pantas saja yang disampaikan. Ada hal-hal yang tidak layak diekspose ke masyarakat luas. Dalam menjalankan fungsi ini tentu pers diharapkan mampu menyampaikan informasi yang bersifat mendidik. Namun, fungsi ini terkadang masih dikesampingkan oleh kalangan perusahaan pers, lantaran tuntutan bisnis dan persaingan pasar. Lantas apa yang harus dilakukan masyarakat termasuk peserta didik menanggapi masalah ini. Caranya, kalangan pelajar betul-betul tahu dan dapat menentukan bahan bacaan dan tontonan yang tepat dan bermanfaat. Berikut hasil wawancara yang dilakukan oleh Penulis kepada informan sehubungan dengan fungsi pers dalam pelaksanaan pilkada tahun lalu. Radiansyah sebagai tokoh pemuda Majene mengatakan bahwa :

“Fungsi pers sangat membantu masyarakat untuk mengenali ataupun mengetahui beberapa tahapan-tahapan pilkada tahun 2015 lalu”.

(Wawancara RS, 24 Nopember 2016)

Sebagaimana wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa fungsi pers sangat membantu jalannya proses pemilukada dan memperluas pengetahuan masyarakat mengenai pemilukada. Dimana dalam hal ini pers membantu masyarakat untuk mengenali dan mengetahui tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah secara detail sehingga masyarakat desa tidak kebingungan dalam proses pemilihan tersebut.

- b. Mampu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pemilukada.

Salah satu fungsi pers sebagai media pendidikan, pers harus mampu meningkatkan minat baca masyarakat sehingga dapat membuka wawasan masyarakat agar mereka dapat berpartisipasi dalam menyampaikan suaranya pada pemilukada. Meningkatkan minat baca harus dibarengi dengan memberikan informasi yang berkualitas dan sesuai dengan yang dibutuhkan masyarakat. Jika masyarakat sudah tinggi minat bacanya, maka generasi muda Indonesia akan mampu menggali dan manampung banyak informasi. Dengan banyak informasi dan pengetahuan maka masyarakat akan mampu lebih kritis dalam menganalisa perkembangan dunia ke depan khususnya dalam dunia politik, seperti pemilihan kepala daerah yang diselenggarakan di Kabupaten Majene. Seperti dikatakan oleh Jabal selaku masyarakat di Majene yang mengatakan bahwa :

“Saya tidak terlalu mengikuti proses pilkada ini karna kebetulan tempat berjauhan dengan pusat pemerintahan, yang kami harapkan partisipasi pers agar lebih aktif menerbitkan berita khususnya pada berita tentang pilkada di Majene”.  
(Wawancara JB, 25 Nopember 2016).

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa diharapkan partisipasi pers untuk lebih aktif dalam memberikan berita jalannya proses Pilkada di Kabupaten Majene, khususnya kepada masyarakat yang tempat tinggalnya jauh dari kota atau pusat pemerintahan agar semua masyarakat desa yang terpencil sekalipun bisa mengikuti jalannya proses pilkada melalui TV, koran atau sarana lainnya . Ketua Panwaslu Usman S.Ag mengatakan dalam hasil wawancara, yaitu :

“Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan hak suaranya di TPS sangat tinggi, hal ini bisa dilihat dari persentase pemilih. Dimana tingkat kecurangan yang dilakukan sangat rendah dan kemungkinan pelanggaran sangatlah kecil terjadi karena fungsi dan peran dari pers sudah sangat baik dalam mensosialisasikan pelaksanaan pilkada khususnya di Kabupaten Majene”.  
(Wawancara UM, 30 Nopember 2016).

Sebagaimana hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi pers sebagai media pendidikan mampu membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada. Hal ini dapat dilihat pada tingginya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan hak suaranya di setiap TPS yang ada di Kabupaten Majene, sehingga tingkat kecurangan yang dilakukan sangatlah rendah karena pers dapat membuka wawasan masyarakat tentang pentingnya partisipasi dalam pilkada.

c. Sosialisasi tentang pemilukada.

Fungsi pers sebagai media pendidikan dalam pemilukada di Kabupaten Majene juga sebagai sosialisasi dalam memantau perkembangan jalannya proses pemilukada. Melalui pers masyarakat di Kabupaten Majene dapat mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Majene. Seperti yang dikatakan Jabir sebagai tokoh pemuda Majene yang mengatakan bahwa :

“Fungsi pers sangat membantu masyarakat dalam memantau perkembangan jalannya proses pemilukada. Melalui pers masyarakat di Kabupaten Majene dapat mensosialisasikan pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah di Kabupaten Majene.

(Wawancara JR, 01 Desember 2016).

Sebagaimana hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi pers sebagai media pendidikan sangat membantu masyarakat dalam memantau jalannya proses pemilukada dan dapat mensosialisasikan pelaksanaan pemilukada di Kabupaten Majene. Selain itu Ediatma, selaku wartawan Radar Sulbar juga mengatakan bahwa :

“Dalam pelaksanaan pilkada ini, pers dianggap mampu menjadi alat untuk mensosialisasikan tahapan pilkada kepada masyarakat untuk menyalurkan suaranya di TPS sehingga dewan pers mendapat penghargaan dari KPU sebagai rekan kerja yang baik”.

(Wawancara ET, 02 Desember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pers mampu menjadi alat dalam mensosialisasikan tahapan pilkada kepada masyarakat luas untuk menyalurkan suaranya di TPS. Dengan cara ini, media mampu membantu untuk melahirkan Sumber

Daya Manusia (SDM) yang handal dan mampu hidup mandiri. Itu artinya, media mampu menggiring masyarakat dan generasi muda untuk mewujudkan tujuan pendidikan di Indonesia yang sebenarnya. Melalui pers masyarakat di Kabupaten Majene khususnya dapat membuka cakrawala pikir tentang pentingnya partisipasi dalam pemilukada, memperluas pengetahuan dan mengadakan sosialisasi tentang pemilukada tersebut. Pelaksanaan fungsi pers di Kabupaten majene sebagai media pendidikan dalam pemilukada tersebut berjalan lancar dan sangat optimal.

### **3. Fungsi Pers sebagai media komunikasi**

Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik yang meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.

Pers juga mempunyai segi lain, bukan sekedar mencerminkan apa yang terjadi secara reaktif, secara paska kejadian, post factum, tetapi melihat lebih dulu, merencanakan dan mengagendakan. Pers bukan saja riding the news, tetapi, sebutlah sekedar untuk membedakan, making the news, planning the news. Dari sisi inilah, pers dikatakan tidak sekedar terbawa oleh peristiwa dan masalah, tetapi semacam membuat, menentukan atau lebih proposional mempengaruhi agenda. Adapun fungsi



pers sebagai alat komunikasi sehubungan dengan pemilukada di Kabupaten Majene, yaitu :

a. Menyampaikan informasi tentang pemilukada

Fungsi pers sebagai media komunikasi dalam pemilukada di Kabupaten Majene sangat berperan dalam proses pemilukada tersebut. Pers menjadi sarana bagi antar pihak untuk melakukan hubungan, menjalin komunikasi, mendapatkan kebutuhan informasi, dan media untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan, tertulis maupun secara visual. Media massa dapat menjadi media komunikasi dua arah, yaitu dari masyarakat desa ke kota dan dari kota ke desa ataupun antar kabupaten khususnya Sulawesi Barat. Seperti yang dikatakan oleh Abdul Hafid salah satu wartawan senior Sulbar Express, yang mengatakan bahwa :

“Dengan adanya pers sebagai media komunikasi di Kabupaten Majene dapat mampu mengangkat partisipasi pemilih dalam pelaksanaan pemilukada tahun 2015 yang mana kita ketahui bahwa persentase pemilih menjadi sangat tinggi yakni 84,13% dari 107.464 total suara dari jumlah suara yang sah yaitu 94.410 suara.”

(Wawancara AH, 22 Nopember 2016)

Sebagaimana hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi pers sebagai media komunikasi dalam partisipasi pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Majene tahun 2015 lalu, mampu mengangkat partisipasi pemilih dengan perolehan suara yang sangat tinggi yakni 84,13% dari 107.464 total suara dari jumlah suara yang

sah sebesar 94.410 suara. Hal ini juga di kemukakan oleh Rudiensyah selaku tokoh pemuda Majene yang mengatakan bahwa :

“Fungsi pers dalam pelaksanaan pilkada ini mampu dirasakan dengan baik dan harus selalu dipandang positif, sebagai media komunikasi yang menyampaikan informasi yang lengkap tentang proses pemilukada di Majene”.  
(Wawancara RS, 07 Desember 2016)

Hasil wawancara tersebut di atas, dapat dipahami bahwa fungsi pers dalam pemilukada ini mampu dirasakan dengan baik dan dipandang positif sebagai media komunikasi yang menyampaikan informasi lengkap sehubungan dengan proses pemilukada bagi masyarakat desa Kabupaten Majene.

- b. Berkomunikasi dengan para kandidat/calon kepala daerah untuk menarik simpati masyarakat.

Fungsi pers sebagai media komunikasi juga sebagai penghubung dalam berkomunikasi dengan para kandidat/calon kepala daerah. Seperti yang dikemukakan oleh Asmanuddin, S.IP selaku ketua KPU Majene, yang mengatakan bahwa :

“Ketika mengamati independensi dari pers dalam pelaksanaan pilkada adalah tahapan-tahapan yang telah dilalui mulai dari sosialisasi dari calon atau pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bisa dikatakan sangat baik karena ini sangat membantu KPU dalam menarik simpati masyarakat”.  
(Wawancara AD, 23 Nopember 2016)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa pers sangat membantu KPU dalam menarik simpati masyarakat selain itu berkomunikasi dengan para kandidat/calon kepala daerah untuk

mengetahui informasi mengenai calon kepala daerah kepada masyarakat, agar dapat mengetahui profil calon kepala daerah yang dipilihnya. Sedangkan dari tokoh masyarakat, Jabir mengatakan bahwa :

“Lembaga pers harus mampu menjadi media yang betul-betul memberikan kesadaran kepada masyarakat dalam hal mengurangi angka golput di pemilukada ini sehingga lebih berkualitas yaitu berkomunikasi dengan para calon/kandidat kepala daerah agar menarik simpati masyarakat untuk memilih calon kepala daerahnya sesuai dengan hati nuraninya ”.  
(Wawancara JR, 10 Desember 2016).

Sebagaimana hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa fungsi pers sebagai media dalam berkomunikasi harus mampu menjadi media yang betul-betul memberikan kesadaran kepada masyarakat agar jangan sampai kehilangan hak suaranya (golput) di pemilukada karena akan mengurangi bobot dan kualitasnya, maka dari itu pers berkomunikasi dengan para kandidat/calon kepala daerah agar mampu menarik simpati masyarakat dan memilih calon kepala daerah sesuai dengan keinginannya sendiri. Pers sebagai media komunikasi massa, memiliki fungsi yang cukup strategis dalam masyarakat. Dalam berbagai literatur, banyak ditemukan kajian atau uraian tentang fungsi pers sebagai media komunikasi massa, diantaranya yaitu fungsi pengawasan (*control*), fungsi *social learning*, fungsi penyampaian informasi, fungsi transformasi budaya, dan fungsi hiburan Pelaksanaan fungsi pers di Kabupaten majene

sebagai media komunikasi dalam pilukada tahun 2015 berjalan lancar dan sangat optimal.

### **C. Fungsi Pers Dalam Pilukada di Kabupaten Majene**

Fungsi pers dalam pilukada di Kabupaten Majene yaitu sebagai media yang menghubungkan atau menjembatani berbagai kegiatan politik di Indonesia, termasuk kegiatan Pemilihan Kepala Daerah yang dilaksanakan di Kabupaten Majene pada tahun 2015. Pers mempunyai peranan yang sangat penting dalam pelaksanaan pemilu ini. Berdasarkan wawancara dengan Kadir Tanniewa selaku pimpinan redaksi Radar Sulbar mengatakan bahwa :

“Pers sangat aktif mengawal jalannya Pilkada di Majene. Mulai dari tahapan KPU hingga ke tingkat kecamatan sampai selesai, bahkan kita kemarin wanti-wanti jangan sampai pasca perhitungan suara ada aksi demo, Alhamdulillah di Majene luar biasa pilkada tahun 2015 aman.”  
(Wawancara KT, 20 November 2016).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka dapat dipahami bahwa sebagai institusi kemasyarakatan, pers memiliki tanggung jawab sosial yang sangat besar kepada masyarakat. Pemilihan Umum Kepala Daerah yang dilaksanakan tahun 2015 kemarin tidak lepas dari peran serta Pers yang sangat aktif mengawal jalannya Pilkada di Majene. Mulai dari tahapan KPU hingga ke tingkat kecamatan sampai selesai, serta menghimbau jangan sampai pasca perhitungan suara ada aksi demo agar pemilu dapat berjalan dengan aman dan damai. Lembaga pers didaulat harus bisa menjadi media yang dapat memberikan kesadaran kepada masyarakat agar wajib

memberikan hak suaranya dalam pilkada sehingga tidak terjadi golput khususnya di Kabupaten Majene.

Rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kabupaten tanggal 16 Desember 2015, yaitu Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Majene Drs. H. Fahmi Massiara, M.H dan Lukman, S.pd., M.Pd, menduduki posisi teratas dengan jumlah perolehan suara sebesar 40.451 atau 44,74% suara. Diurutan kedua yaitu Drs. Muh. Risal Sirajuddin, M.Si dan DR.H. Mulyadi Bintaha, M.Pd dengan jumlah perolehan suara sebesar 29.006 atau 32,08% suara. Dan di urutan terakhir yaitu H. Arifin Nurdin, SE., M.S.Ak dan Andi Irfan Sulaiman, SE., M.Ap dengan jumlah perolehan suara sebesar 20.952 atau 23,17% suara.

Pemungutan dan penghitungan suara di KPPS serentak dilaksanakan pada hari yang diliburkan pada hari senin tanggal 10 Oktober 2011. Pemungutan dilaksanakan tepat pukul 07.00 s/d 13.00 wita dan dilanjutkan perhitungan suara sampai selesai pada hari yang sama di 364 TPS dalam wilayah Kabupaten Majene berlangsung aman, tertib dan sukses.

Rapat Pleno rekapitulasi hasil perhitungan suara Kabupaten Majene yang berlangsung di Aula Kantor KPU Kabupaten Majene, Jalan Jenderal Ahmad Yani pada hari Rabu 16 Desember 2015. Rapat tersebut dipimpin langsung oleh Ketua KPUD Majene bersama 4 komisioner lainnya. Dalam rapat pleno ini turut hadir Sekda Majene Syamsiar Muhtar yang mewakili Bupati Majene, Ketua DPRD Kabupaten Majene Darmansyah, Dandim 1401/Majene Letkol Infrantri Jamaluddin, Kapolres Majene AKBP Sonny

Mahar Budi, Kejari Majene, Ketua Panwaslu Provinsi Sulbar diwakili oleh Muh.Saleh dan Ketua Panwaslu Kabupaten Majene, Usman.

Adapun wawancara dengan Abdul Hafid, selaku pers yang meliput langsung jalannya pemilu, mengatakan bahwa :

“Rapat pleno rekapitulasi Pilkada di Kabupaten Majene di mulai pukul 09.30 Wita dan selesai pada pukul 12.30 siang hari. Rapat tersebut berjalan tertib, aman dan terkendali sesuai dengan yang diharapkan.”

(Wawancara AH, 12 Desember 2016)

Sebagaimana hasil wawancara tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa rapat pleno rekapitulasi pemilihan kepala umum daerah di Kabupaten Majene tahun 2015, berjalan dengan aman sesuai harapan dari mulai pembukaan sampai penutupan berkat penanganan pers yang sangat aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai institusi kemasyarakatan.

#### **D. Efektivitas Fungsi Pers**

Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan sejauh mana rencana dapat tercapai. Semakin banyak rencana yang dapat dicapai, maka semakin efektif pula kegiatan tersebut, sehingga kata efektivitas dapat juga diartikan sebagai tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari suatu cara atau usaha tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.

Fungsi pers dalam pilukada sebagai media informasi, media pendidikan dan juga sebagai media komunikasi khususnya di Kabupaten Majene ini sangat berperan penting dimana pers menjadi sarana bagi semua antar pihak dalam berinteraksi sosial. Pers menjadi penghubung satu sama lain baik secara lisan, tertulis, maupun secara visual. Dengan kata lain, fungsi

pers sebagai media informasi, media pendidikan dan sebagai media komunikasi sudah menunjukkan efektivitas fungsi pers dalam pemilukada di Kabupaten Majene.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan hasil deskripsi yang dilakukan di Kabupaten Majene sehubungan dengan fungsi pers dalam pemilihan umum kepala daerah tahun 2015 yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan antara lain :

1. Fungsi pers sebagai media informasi adalah sebagai sarana dalam memberikan informasi sehubungan dengan pemilihan umum kepala daerah 2015 di Kabupaten Majene sehingga membuat masyarakat yang melihat dan mendengar dapat mengetahui informasi yang diberikan meskipun tidak secara langsung datang ke tempat lokasi jalannya pelaksanaan pemilukada tersebut yaitu melalui berbagai media informasi baik melalui siaran Televisi, Radio, Majalah, Surat Kabar, Internet dan berbagai alat informasi lainnya.
2. Fungsi pers sebagai media pendidikan (*mass education*) yaitu pers dapat memuat informasi-informasi yang berguna dalam pengembangan wawasan dan ilmu pengetahuan masyarakat pedesaan di Kabupaten majene sehubungan dengan pemilukada tersebut. Fungsi pers sebagai media pendidikan dalam pemilukada di Kabupaten Majene sangat berperan dalam memantau perkembangan jalannya proses pemilukada tersebut. Melalui pers masyarakat di Kabupaten Majene dapat meningkatkan minat baca dan menambah wawasan tentang dunia politik yang sedang



berlangsung di Indonesia khususnya di Kabupaten Majene. Pelaksanaan fungsi pers di Kabupaten Majene sebagai media pendidikan dalam pemilukada tersebut berjalan lancar dan sangat optimal.

3. Fungsi Pers sebagai Media Komunikasi yaitu pers menjadi sarana bagi antar pihak untuk melakukan hubungan, menjalin komunikasi, mendapatkan kebutuhan informasi, dan media untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan, tertulis maupun secara visual. Fungsi pers sebagai media komunikasi dalam pemilukada di Kabupaten Majene sangat berperan dalam proses pemilukada tersebut. Pers menjadi sarana bagi antar pihak untuk melakukan hubungan, menjalin komunikasi, mendapatkan kebutuhan informasi, dan media untuk mengekspresikan diri, baik secara lisan, tertulis maupun secara visual. Pelaksanaan fungsi pers di Kabupaten majene sebagai media komunikasi dalam pemilukada tersebut berjalan lancar dan sangat optimal.

## **B. Saran**

Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Majene diharapkan dapat menjadi pengalaman dan pembelajaran bagi semua tingkat penyelenggara baik di tingkat KPU Kabupaten Majene dan semua jajaran KPK dan PPS. Berbagai kekurangan dan kelemahan dalam penyelenggaraan ini dapat menjadi pembelajaran ke depan untuk menjadi penyelenggara pemilu yang penuh dengan integritas, profesionalitas, proporsional dan penuh dengan kejujuran, adil dan mandiri.

## DAFTAR PUSTAKA

- Crawford, John. 2000. Ed.2. *Evolution of Libraries and Information Services*. London : Aslib, the association for information management and information management international.
- Echols, John M. dan Hassan Shadily. 2000. *Kamus Inggris Indonesia : An English – Indonesian Dictionary*. Jakarta : PT. Gramedia.
- Firdaus, Edwin. 2015. *Pemilihan Umum Kepala Daerah di Kabupaten Majene*.Tribunnews.com.
- Gamble W. Michael & Gamble Kwal Teri. 2012. *Human Communication*. Newyork : The McGraw-Hill Companies.
- Griffin, P & Nix, P. 2000. *Educational assessment and reporting*. Sydney : Harcout Brace Javanovich, Publisher.
- Hikmat, Harry. 2004. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Edisi Revisi. Bandung : Humaniora Utama Press.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2016. *Pengertian fungsi dan Pers*. Jakarta.
- Kamus Umum Bahasa Indonesia (KUBI). 2012. *Pengertian Pers*. Jakarta.
- Kridalaksana, Harimurti. 2000. *Leksikon Komunikasi*. Jakarta : Pradnya Paramita.
- Mahfud Marsahid, Choirul. 2015. *Pemilihan Umum Kepala Daerah di Indonesia*. Google.com.
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2005. Tentang Pemilihan Pengesahan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 3. Tentang Perpu Tahun 2005.
- Radar Sulbar. 2015. Publish.com
- Rahayu, Srikandi. 2015. *Pilkada dalam pemerintah, Politik*. Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Stephanus. 2015. *Fungsi Pers dan Peranannya*. TS. Jaya Vote google plus.

Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.

Tohirin, Muhajir. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rakesarasin.

UU Nomor 22 Tahun 2007. Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

UU Nomor 32 Tahun 2004. Tentang Pemerintahan Daerah.

UU Nomor 40 Tahun 1999. Tentang Pers.

Yunanda, Martha. 2009. *Evaluasi dalam Islam*. Jakarta.

## RIWAYAT HIDUP



IRWAN. Lahir di Karema tanggal 01 April 1992, sebagai anak ke tiga dari 7 bersaudara, buah hati dari pasangan Ayah Alimuddin Umar dan Aminah.

Penulis mulai masuk jenjang pendidikan formal di SD 22 Pellatoang, pada tahun 2001 kemudian penulis lanjut pada tahun yang sama 2007 dan tamat pada tahun 2009 di SMPN 2 Sendana Kabupaten Majene, setelah itu penulis lanjut Sekolah Menengah Atas dan pada tahun 2009 dan tamat pada tahun 2012 di SMAN 1 Sendana. Setelah tammat SMA tahun 2012 penulis melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi swasta, ditahun 2012 penulis terdaftar sebagai mahasiswa pada Jurusan Ilmu Pemerintahan, Program Studi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Strata Satu (S1), Melalui jalur umum.